



Pemerintah Kabupaten Natuna



LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH**

Jalan Batu Sisir – Bukit Aral, Gedung D Pulau Subi Kecil
Telp. (0773) 31445, Fax. (0773) 31545
Email : bpkpad.natuna@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna tahun 2017 telah selesai disusun.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggaraan Negara, dan untuk meningkatkan pengawasan di Daerah.

Laporan Tahunan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tahun 2017 bertujuan untuk menyajikan berbagai informasi kinerja tahunan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang telah dilaksanakan di tahun 2017 sebagai penunjang visi dan misi Bupati Natuna tahun 2016 – 2021.

Kami menyadari bahwa Laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah .

Demikianlah laporan ini di sampaikan, kami berharap Laporan Tahunan ini dapat dipahami dengan baik dan dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ranai, 10 Januari 2018.

Kepala,



R. DICKY KUSNIADI, SE

NIP. 19660503 198703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
Sejarah Berdirinya BPKPAD	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	3
Gambaran Umum	3
A. Tujuan Pokok	3
B. Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	4
D. Sumber Daya Manusia (SDM)	18
E. Sarana Prasarana	23
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	25
A. Visi Misi RPJMD 2016-2021	25
B. Program Prioritas BPKPAD Pendukung Visi Misi RPJMD 2016-2021	32
C. Program BPKPAD yang Tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yang disertai Pendanaan	34
BAB IV HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN	39
A. Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2017	38
B. Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2018	51
C. Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran/Program BPKPAD yang Tertuang dalam RPJMD 2016-2021	54
D. Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga	56
BAB V HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RUTINITAS BPKPAD	58
1. Bagian Sekretariat	58

2. Bidang Anggaran	60
3. Bidang Pendapatan	61
4. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah	62
5. Bidang Aset	63
BAB VI PENUTUP	64
Kesimpulan	65
Rekomendasi	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai PNS Menurut Jenis Kelamin.....	18
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Non PNS Menurut Jenis Kelamin.....	19
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang	20
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai PNS Menurut Tingkat Pendidikan.....	21
Tabel 2.5	Komposisi Pegawai Non PNS Menurut Tingkat Pendidikan.....	22
Tabel 2.6	Komposisi Pegawai PNS Menurut Diklat Kepemimpinan Tahun 2017	23
Tabel 2.7	Jenis dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Natuna Tahun 2017	24
Tabel 3.1	Program Prioritas Pendukung Visi Misi RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	33
Tabel 3.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaannya Kabupaten Natuna Tahun 2012-2021 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	35
Tabel 3.3	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Pendanaannya Kabupaten Natuna Tahun 2012-2021 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	37
Tabel 4.1	Penetapan Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Natuna Tahun 2017	40
Tabel 4.2	Pengukuran Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Natuna Tahun 2017	40
Tabel 4.3	Pengukuran Kinerja Kegiatan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Natuna Tahun 2017	41
Tabel 4.4	Penetapan Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Tahun 2016	45
Tabel 4.5	Pengukuran Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Tahun 2016	45
Tabel 4.6	Pengukuran Kinerja Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Tahun 2016	47

Tabel 4.7	Program/Kegiatan dan Target Kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Natuna Tahun 2018	52
Tabel 4.8	Capaian Indikator Kinerja Sasaran/Program BPKPAD dalam RPJMD Pendukung Visi Misi Kabupaten Natuna Tahun 2017	55
Tabel 5.1	Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Natuna Tahun 2017	58
Tabel 5.2	Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Natuna Tahun 2017	60
Tabel 5.3	Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendapatan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Natuna Tahun 2017	61
Tabel 5.4	Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bidang Akuntansi Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Natuna Tahun 2017	62
Tabel 5.5	Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Natuna Tahun 2017	63

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna 16

LAMPIRAN

- Lampiran I Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah tahun 2017, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna.
- Lampiran II Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun anggaran 2017, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna.
- Lampiran III Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Dalam RPJMD Tahun 2016-2021, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna.
- Lampiran IV Rekomendasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2018/2019, dari Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2017.
- Lampiran V Program Prioritas Pendukung Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2016-2021, Pembangunan Daerah tahun 2017, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna.
- Lampiran VI Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaannya Kabupaten Natuna Tahun 2017-2021, Pembangunan Daerah tahun 2017, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna.
- Lampiran VII Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017.
- Lampiran VIII Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018.
- Lampiran IX MoU Kerjasama dengan PT. Bank Riau Kepri Cab. Ranai.
- Lampiran X MoU Kerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Cab. Natuna.
- Lampiran XI MoU Kerjasama dengan BPJS.



Pemerintah Kabupaten Natuna

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH**

BAB. I



**Laporan Tahunan
Ta. 2017**

BAB I PENDAHULUAN

SEJARAH BERDIRINYA BPKPAD

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terbentuk berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah, dan Perbup Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sejarah awal terbentuknya Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah bermula dari terbitnya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Bermula dari Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 ini lah, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, yang pada masa itu Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah masih berbentuk Bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna yaitu Bagian Keuangan, seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2005, Perda Nomor. 7 Tahun 2001 di cabut dan digantikan dengan Perda Nomor. 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, dengan dicabutnya Perda Nomor. 7 Tahun 2001 ini, tidak terjadi perubahan pada struktur, tugas pokok, dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

pada waktu itu (tahun 2005) masih bernama Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

Lebih kurang 3 tahun berjalan, Perda Nomor. 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah di cabut dan di gantikan dengan Perda Nomor. 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Natuna, sehingga Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Lebih kurang 3 tahun berjalan perda Nomor. 19 Tahun 2008 dicabut dan digantikan dengan Perda Nomor. 05 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna, sehingga Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Selanjutnya dengan dicabutnya Perda Nomor. 05 Tahun 2011, dan digantikan dengan Perda Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).

Dengan demikian Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) sesuai dengan Perda Nomor 03 Tahun 2017 dan Perbup Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) baru kurang lebih 1 (satu) tahun menjalankan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi di tahun 2017 ini, untuk lebih lanjut **Gambaran Umum BPKPAD** akan di bahas pada **BAB.II**.



Pemerintah Kabupaten Natuna

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH**

BAB. II



**Laporan Tahunan
Ta. 2017**

BAB II **SAMBARAN UMUM**

Dalam Perda nomor. 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), secara umum sebagai berikut:

A. Tujuan Pokok

Tujuan dari Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dalam susunan Organisasi Perangkat Daerah yaitu; Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai lingkup tugasnya.

B. Fungsi

Fungsi dari Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dalam susunan Organisasi Perangkat Daerah yaitu;

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai lingkup tugasnya;

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Bagian Sekretaris, terdiri dari;
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari;
 1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan.
 2. Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pelaporan.
- d. Bidang Anggaran, terdiri dari;
 1. Sub Bidang Penyusunan APBD dan Bina Anggaran Daerah.
 2. Sub Bidang Pembiayaan.
- e. Bidang Aset, terdiri dari;
 1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan.
 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan.
- f. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah, terdiri dari;
 1. Sub Bidang Akuntansi dan informasi Keuangan Daerah.
 2. Sub Bidang Perbendaharaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Dengan Ikhtisar Jabatan, Tugas dan Fungsi dari Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, yang diantaranya:

1. Kepala

- a. Kepala BPKPAD memiliki Ikhtisar Jabatan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah agar dapat melaksanakan pelayanan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

- b. Kepala BPKPAD mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah dibidang keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai lingkup tugasnya.
- c. Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;
 3. Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang menjadi tugas pokok selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. Mengkoordinasikan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
 5. Mengkoordinasikan program, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
 6. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahannya dengan instansi terkait;
 7. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan daerah tertib;
 8. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
 9. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 10. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
 11. Mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Kepala BPKPAD menjalankan fungsi sebagai berikut:
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai lingkup tugasnya.

2. Sekretariat

- a. Ikhtisar Jabatan memimpin pelaksanaan tugas sekretariat dalam menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan tugas Badan.
- b. Tugas pokok Sekretariat adalah menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolanserta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan.
- c. Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 1. Menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan badan dan dilingkup sekretariat;

2. Menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi dan rumah tangga;
 3. Menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
 4. Menyusun pelaporan badan;
 5. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 6. Mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan badan;
 7. Mengevaluasi rencana kerja sekretariat dan kinerja badan;
 8. Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup sekretariat;
 9. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 10. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Fungsi Sekretariat terdiri dari :, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan
1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang sekretariat
 2. Peyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

3. Bidang Pendapatan

- a. Ikhtisar Jabatan Bidang Pendapatan Peningkatan sumber pendapatan daerah, pendataan dan pendaftaran wajib pajak, objek pajak dan retribusi daerah.
- b. Tugas Pokok Bidang Pendapatan adalah merencanakan kebijakan umum tentang penggalian dan pengembangan sumber pendapatan daerah.
- c. Uraian Tugas bidang Pendapatan meliputi:
 - 1. Merencanakan kebijakan umum kepala organisasi perangkat daerah dan renstra organisasi perangkat daerah sebagai pedoman kerja;
 - 2. Merencanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pendapatan;
 - 3. Menyusun tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di pendapatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - 4. Merencanakan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pendapatan;
 - 5. Merencanakan usul dan saran kepada kepala badan selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuat kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
 - 6. Mengevaluasi kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
 - 7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan bidang pendapatan kepada kepala badan baik secara lisan maupun tertulis.
- d. Fungsi Bidang Pendapatan:
 - 1. Pelaksanaan kegiatan penggalian dan pengembangan sumber pendapatan;
 - 2. Pelaksanaan perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan pendapatan daerah;
 - 3. Pelaksanaan penyusunan dan penghitungan target pendapatan daerah;

4. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
5. Penyusunan daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
6. Memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan pemeriksaan dan pengolahan data pajak dan retribusi daerah;
7. Melakukan perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah;
8. Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan atau pembayaran atau penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang telah mendapat persetujuan;
9. Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
10. Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lain-lain diluar pajak dan retribusi daerah;
12. Melakukan kegiatan pengolahan dan pengembangan pendapatan.

4. Bidang Anggaran,

- a. Ikhtisar Jabatan bidang Anggaran adalah melaksanakan perencanaan, koordinasi, penyusunan program/kegiatan, mengendalikan dan mengevaluasi, serta serta membuat laporan hasil kerja di bidang Anggaran berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Tugas pokok Bidang Anggaran adalah Perumusan prosedur penyusunan rancangan Perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan, penyusunan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan, pengendalian penyusunan anggaran sesuai peraturan keuangan yang

berlaku agar tertib administrasi, dan mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan teknis penyusunan anggaran dan belanja, pelaporan BLUD, JKN, Penyertaan Modal, Dana Bergulir, investasi jangka pendek, tunjangan profesi guru PNSD, Tambahan Penghasilan guru PNSD dan Piutang.

c. Uraian Tugas Bidang Anggaran:

1. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang APBD;
2. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang P-APBD;
3. Menyusun pedoman penyusunan RKA-SKPD DN RKA-PPKD;
4. Menyusun pedoman penyusunan PRKA-SKPD dan PRKA-PPKD;
5. Mengevaluasi RKA-SKPD dan RKA-PPKD untuk menyusun rancangan APBD;
6. Mengevaluasi PRKA-SKPD dan PRKA-PPKD untuk menyusun rancangan Perubahan APBD;
7. Mengevaluasi DPA-SKPD dan DPA-SKPKD;
8. Mengevaluasi DPPA-SKPD dan DPPA SKPKD;
9. Mengevaluasi pergeseran anggaran;
10. Menyusun anggaran kas pemerintah daerah untuk arus kas masuk dan arus kas keluar;
11. Merencanakan pemantauan perkembangan pelaksanaan APBD;
12. Merencanakan koordinasi penyusunan dan pengajuan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dalam rangka penyusunan RAPBD;
13. Merencanakan penyelenggaraan koordinasi percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran;
14. Merencanakan penyelenggaraan koordinasi program-program nasional sesuai bidang yang dilaksanakan secara bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
15. Menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLUD;

16. Menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja JKN;
17. Menyusun laporan penyertaan modal;
18. Menyusun laporan dana bergulir;
19. Menyusun investasi jangka pendek;
20. Menyusun tunjangan profesi guru PNSD;
21. Menyusun tambahan penghasilan guru PNSD;
22. Menyusun piutang hasil temuan.

d. Fungsi Bidang Anggaran sebagai berikut:

1. Penyusunan dan perumusan program kerja di bidang Anggaran;
2. Pelaksanaan penyiapan dan perumusan kebijakan teknis petunjuk rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah
3. Pelaksanaan penyusunan rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
4. Menyiapkan data dana perimbangan;
5. Menyelenggarakan penyertaan modal, dana bergulir dan pinjaman daerah;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi tugas bidang anggaran;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pemimpin berdasarkan hasil kerja;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Aset

- a. Ikhtisar jabatan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta inventarisasi

- b. Tugas Pokok Bidang Aset** Penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah;
- c. Uraian Tugas Bidang Aset:**
 - 1. Menyusun dan menyiapkan rencana operasional program dan kegiatan bidang aset;
 - 2. Membagi tugas pada bawahan dengan cara disposisi maupun lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
 - 3. Menyusun dan menyiapkan rancangan pedoman peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan barang milik daerah;
 - 4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemanfaatan barang milik daerah yang ada pada dinas/badan/unit kerja lainnya secara berkala melalui inventarisasi guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
 - 5. Menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semester (LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) dari masing-masing SKPD kepada Kepala Daerah melalui kepala Badan;
 - 6. Menyusun mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - 7. Meneliti, menelaah, memberi pertimbangan dan menindaklanjuti atas usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
 - 8. Menghimpun, menyimpan dan mengamankan seluruh bukti asli kepemilikan barang milik daerah;
 - 9. Memonitoring dan mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran sub bidang aset berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- d. Fungsi Bidang Aset:**
 - 1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan lingkup aset;

2. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang aset;
3. Pelaksanaan pengawas dan pengendalian pemanfaatan barang milik daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah

- a. Ikhtisar Jabatan Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku.
- b. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan, penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
- c. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah memiliki uraian tugas:
 1. Merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan dengan perbendaharaan berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 2. Mengendalikan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
 3. Menyusun rekapitulasi realisasi gaji PNS dilingkungan pemerintah daerah sebagai lampiran pencairan DAU setiap bulannya;
 4. Memeriksa verifikasi SPM, penerbitan SP2D, penandatanganan bilyet giro SKPD, penerbitan SKPP;
 5. Menyusun laporan pemungutan/pemotongan iuran PFK, iuran wajib pajak dan taperum gaji pegawai, laporan penempatan uang, laporan pengeluaran piutang dan utang daerah;
 6. Menyusun surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B) BLUD RSUD dan Dana Kapitasi JKN;

7. Mengadakan evaluasi dengan SKPD terkait rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan/pemotongan atas SP2D;
8. Merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntansi pengelolaan keuangan daerah;
10. Menyiapkan pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
11. Menyusun laporan keuangan daerah;
12. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pembinaan bidang akuntansi keuangan daerah berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut.

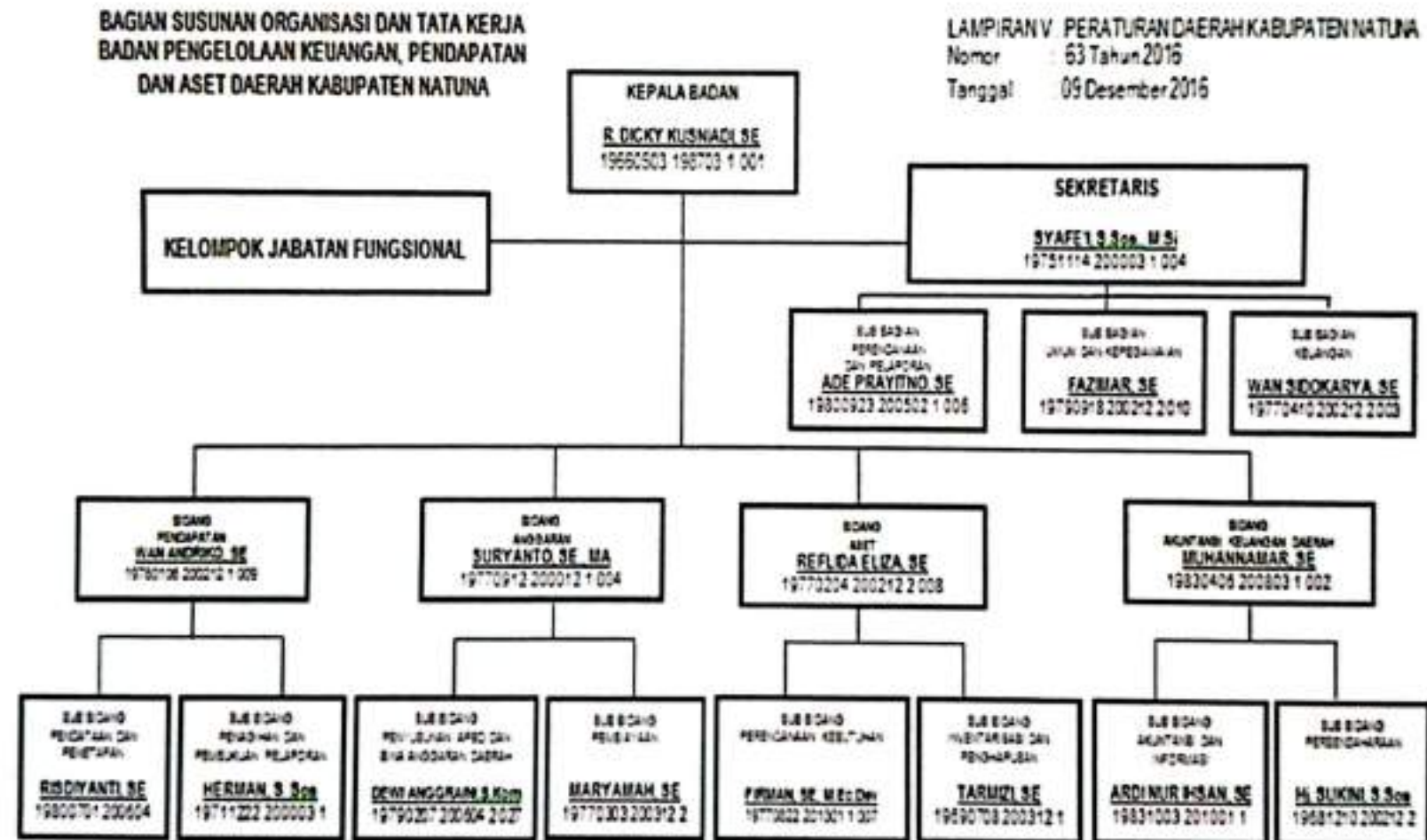
d. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah menjalankan Fungsinya:

1. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan program kerja dan kegiatan lingkup bidang Akuntansi Keuangan Daerah;
2. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah;
3. Melakukan analisis pemberdayaan dalam penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
4. Melaksanakan verifikasi atas SPM dari SKPD dan penerbitan SP2D;
5. Pelaksanaan verifikasi dalam penerbitan SKPP;
6. Melaksanakan verifikasi atas pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK;
7. Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan/pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
8. Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;

9. Melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap sistem tata usaha keuangan daerah dan penggajian;
10. Melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
11. Menyusun laporan keuangan daerah;
12. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
13. Pelaksanaan evaluasi terhadap realisasi APBD;
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Natuna dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu jajaran struktural, dengan struktur organisasi **(Gambar 2.1)** berikut ini:

Gambar. 2.1
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah



Sesuai pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

- a. Sekretaris Daerah, selaku koordinator pengelola keuangan daerah ;
- b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD ;
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB).

Memperhatikan ketentuan tersebut, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPKD, Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dalam hal ini dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Natuna. Mendasari ketentuan tersebut, BPKPAD Kabupaten Natuna memiliki 2 (dua) peran strategis dan paralel, yaitu selaku SKPD dan SKPKD yang mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Selaku SKPD

BPKPAD Kabupaten Natuna mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat regular, koordinasi dan fasilitasi yang menunjang kebutuhan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, utamanya terkait dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan pengelolaan keuangan Pendapatan dan aset daerah serta pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten.

b. Selaku SKPKD

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, BPKPAD selaku SKPKD mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah ;
2. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD ;
3. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ;
4. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
5. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKPAD Kabupaten Natuna didukung oleh sumber daya aparatur yang cukup. Data kepegawaian sampai dengan Desember 2017 Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 115 Orang, dengan rincian sebagai berikut;

1.1 Komposisi Pegawai PNS dan NON PNS

Secara keseluruhan jumlah personil BPKPAD adalah sebanyak 115 (seratus lima belas) orang, dengan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, dalam organisasi BPKPAD sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Komposisi pegawai PNS menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-Laki	40
2	Perempuan	35
Jumlah		75

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPAD Kab. Natuna, 2017

Tabel 2.2.
Komposisi pegawai NON PNS Daerah menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-Laki	20
2	Perempuan	20
Jumlah		40

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPAD Kab. Natuna, 2017

1.2 Pegawai menurut Status, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi pegawai BPKPAD yang berjumlah 115 (seratus lima belas orang) orang terdapat:

- 75 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 40 orang berstatus Honorarium Daerah (NON PNS)

secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada BPKPAD menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Komposisi pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang
Tahun 2017

No	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina Tk.I (IV/b)	-
	Pembina (IV/a)	2
Jumlah I		2
2	Penata Tk.I (III/d)	9
	Penata (III/c)	6
	Penata Muda Tk. I (III/b)	11
	Penata Muda (III/a)	21
Jumlah II		47
3	Pengatur Tk. I (II/d)	10
	Pengatur (II/c)	13
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	3
	Pengatur Muda (II/a)	-
Jumlah III		26
4	Pegawai Honorer Daerah	40
Jumlah IV		40
Jumlah I + II + III + IV		115

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawalan BPKPAD Kab. Natuna, 2017

1.3 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**1. Status sebagai PNS:**

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai BPKPAD adalah sebagai berikut:

- 2 orang berpendidikan S2
- 37 orang berpendidikan S1
- 10 orang berpendidikan Diploma
- 26 orang berpendidikan SLTA/ sederajat

Tabel 2.4.
Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan
Tahun 2017

No	Keterangan	Jumlah
1	Megister S2	2
2	Sertara S1/ Diploma IV	37
3	Diploma III	10
4	SLTA	26
5	SLTP	-
6	SD	-
Jumlah		75

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPAD Kab. Natuna, 2017

2. Status sebagai Non PNS:

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai NON PNS BPKPAD adalah sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) orang berpendidikan S1
- 4 (empat) orang berpendidikan Diploma

- 14 (empat belas) orang berpendidikan SLTA/ sederajat
- 2 (dua) orang berpendidikan SLTP/ sederajat
- 1 (satu) orang berpendidikan SD/ sederajat

Tabel 2.5.
Komposisi
pegawai Honorarim Daerah menurut tingkat pendidikan
Tahun 2017

No	Keterangan	Jumlah
1	Megister S2	-
2	Sertara S1/ Diploma IV	19
3	Diploma III	4
4	SLTA	14
5	SLTP	2
6	SD	1
Jumlah		40

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPAD Kab. Natuna, 2017

1.4 Pegawai Menurut Diklat Kepemimpinan

Dari komposisi pegawai Eselon IV, III, dan II yang ada di BPKPAD yang berjumlah 12 (dua belas) orang terdapat:

- 3 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengikuti Diklat kepemimpinan tingkat III.
- 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengikuti Diklat kepemimpinan tingkat IV.

secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada BPKPAD menurut Diklat Kepemimpinan sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagaimana ditunjukkan pada **tabel 2.6** berikut dibawah ini:

Tabel 2.6.
Komposisi
pegawai Menurut Diklat Kepemimpinan Tahun 2017

No	Keterangan	Jumlah
1	Diklat Pim II	0
2	Diklat Pim III	3
3	Diklat Pim IV	13
Jumlah		16

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPAD Kab. Natuna, 2017

E. Sarana Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, di BPKPAD Kabupaten Natuna terdapat beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki, antara lain dapat dilihat pada **Tabel 2.7** dibawah ini :

Tabel 2.7.
Jenis dan Spesifikasi Sarana Prasarana
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kab. Natuna Tahun 2017

No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Model	Ukuran	Bahan	Jumlah Barang/Register X	Kondisi Barang
1	Mobil	-	-	-	4 Unit	Baik
2	Sepeda Motor	-	-	-	15 Unit	Baik
3	Komputer/PC Unit	-	-	-	46 Unit	Baik
4	Notebook	-	-	-	21 Unit	Baik
5	Laptop	-	-	-	7 Unit	Baik
6	Mesin Hitung Listrik	-	-	-	1 Unit	Baik
7	UPS	-	-	-	30 Unit	Baik
8	Printer	-	-	-	29 Unit	Baik
9	Scanner	-	-	-	6 Unit	Baik
10	Server	-	-	-	2 Unit	Baik
11	Brankas	-	-	-	3 Unit	Baik
12	Alat Penghancur Kertas	-	-	-	18 Unit	Baik
13	Air Condition/AC	-	-	-	33 Unit	Baik
14	Proyektor/Infokus	-	-	-	1 Unit	Baik
15	Mesin Hitung	-	-	-	1 Unit	Baik
16	Mesin Fotocopy	-	-	-	1 Unit	Baik
17	Mesin Absen Fingerprint	-	-	-	1 Unit	Baik
18	Faksimili	-	-	-	1 Unit	Baik
19	Telepon (PABX)	-	-	-	1 Unit	Baik
20	Rak Besi	-	-	-	1 Paket	Baik
21	GPS	-	-	-	21 Unit	Baik
22	Meja	-	-	-	2 Unit	Baik
23	Kursi	-	-	-	69 Unit	Baik
24	Filing Cabinet	-	-	-	17 Unit	Baik
25	Meja Rapat	-	-	-	1 Unit	Baik
26	Kursi Tunggu	-	-	-	8 Unit	Baik
27	Rak Buku	-	-	-	5 Unit	Baik
28	Rak Besi	-	-	-	4 unit	Baik
29	Almari Kayu	-	-	-	9 Unit	Baik
30	Sofa	-	-	-	2 Unit	Baik

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPKPAD Kab. Natuna, 2017



Pemerintah Kabupaten Natuna

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH**

BAB. III



**Laporan Tahunan
Ta. 2017**

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

A. Visi Misi RPJMD 2016-2017.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna merupakan pendukung atas keberhasilan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2016-2021.

Visi Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 adalah:

Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan

Maksud dari pernyataan tersebut adalah:

Cerdas : Masyarakat yang mampu berfikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah.

MANDIRI : Masyarakat yang mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik.

Sehingga dari pernyataan Visi tersebut, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam setiap gerak langkah dalam lima tahun ke depan diharapkan penentuan visi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah harus dapat selaras dan sejalan dengan Visi harus tetap mengacu kepada Visi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2016-2021 yang menitik beratkan dari segi pengelolaan keuangan Daerah, yang merupakan perwujudan visi Bupati Kabupaten Natuna yang ditempuh melalui misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna.

Misi Bupati merupakan komitmen melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati

Natuna, adapun Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Natuna untuk periode 2016-2017, sebagai berikut ini;

Misi Kepala daerah Kabupaten Natuna 2016-2021

1. **Mewujudkan perekonomian berbasis sumberdaya alam potensial daerah;**
 2. **Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik;**
 3. **Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan buruh tani;**
 4. **Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan pembukaan jalan;**
 5. **Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu sebagai payung pembangunan daerah;**
 6. **Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.**
-

Penjelasan masing-masing misi diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan perekonomian berbasis sumberdaya alam potensial daerah Pembangunan yang seimbang dan terpadu antara aspek ekonomi, social, dan lingkungan hidup adalah prinsip pembangunan yang senantiasa menjadi dasar pertimbangan utama bagi seluruh sector dan daerah guna menjamin keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri.

Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam agar sumber daya alam mampu memberikan manfaat

ekonomi, termasuk jasa lingkungannya, dalam jangka panjang dengan tetap menjamin kelestariannya. Dengan demikian, sumber daya alam diharapkan dapat tetap mendukung perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

2) Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Kabupaten Natuna harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Natuna yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi berupa peningkatan pendidikan secara merata di Kabupaten Natuna baik pendidikan formal maupun informal. Sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas.

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar dan hak bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terpenuhi. Untuk lebih meningkatkan pendidikan, diperlukan mutu pendidikan yang baik pula. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan.

3) Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan buruh tani.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Dampak langsung dari ketimpangan ini adalah terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketimpangan pembangunan antarwilayah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun formulasi kebijakan pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan disuatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan peningkatan pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan kerja, pendidikan, maupun berbagai modal lainnya.

Pengembangan dan pembangunan sektor perikanan dan pertanian merupakan konsep dasar yang menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Natuna. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing yang dimiliki Kabupaten Natuna. Pengembangan dan pembangunan sektor perikanan dan pertanian menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian rakyat serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antar wilayah.

4) Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan pembukaan jalan.

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur dan aksesibilitas secara merata. Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistic sehingga dapat meningkatkan daya saing

produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan jalan darat serta penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut.

5) Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu sebagai payung pembangunan daerah.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Natuna, harus dibarengi dengan peningkatan kembali tradisi masyarakat Natuna yang agamis yang memiliki karakter budi luhur. Masyarakat Kabupaten Natuna diharapkan terus meningkatkan akhlak yang mendorong terwujudnya masyarakat yang agamis dan berbudi luhur.

Persoalan kebudayaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Kebudayaan terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Natuna. Mental dan karakter bangsa yang cenderung destruktif dan koruptif mengakibatkan tujuan pembangunan akan sulit terlaksana. Di sisi lain pembangunan multisektor juga membutuhkan peranan kebudayaan untuk mendukung suksesnya program-program yang akan dijalankan. Seringkali timbul permasalahan, ketidakberhasilan sasaran program yang dijalankan di daerah disebabkan kurangnya dukungan dari sisi budaya masyarakat tertentu.

Pembangunan kebudayaan salah satu sektor penting yang harus dilaksanakan untuk kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu ke depannya seluruh stakeholder kebijakan (Pemerintah Pusat dan Daerah) perlu memperhatikan aspek kebudayaan untuk dijadikan

landasan kebijakan dalam melaksanakan programnya masing-masing. Di samping itu pula peranan masyarakat dituntut aktif dalam pembangunan kebudayaan karena tanpa partisipasi masyarakat pelaksanaan pembangunan kebudayaan tidak dapat berhasil dengan sukses.

6) Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, professional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, standar operasional prosedur, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Natuna juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintah yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Terhadap misi yang diemban oleh Kepala daerah Kabupaten Natuna 2016-2021 BPKPAD menjadi pelaksana dan penunjang dari segi pengelolaan keuangan dimana BPKPAD akan memberikan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, SKPD dan masyarakat luas yang terkait dengan pelaksanaan misi tersebut, dari segi pengelolaan keuangan.

Review terhadap RPJPD Kabupaten Natuna menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk periode RPJMD tahun 2016-2021, meliputi:

1. Terwujudnya tata kehidupan masyarakat beragama dan berbudaya yang selaras dan harmonis dalam suasana multi kultur;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi bermanfaat untuk pembangunan daerah;
3. Terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berlandaskan hukum;
4. Terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan untuk kemakmuran masyarakat;
5. Meningkatkannya sarana dan prasarana pembangunan daerah;
6. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup daerah menuju pembangunan yang Berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna yang akan dituangkan ke dalam RPJMD harus konsisten dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang tercantum dalam RPJPD. Dengan demikian maka kebijakan pembangunan lima tahun yang akan datang perlu memastikan dilaksanakannya arah kebijakan pembangunan jangka panjang tersebut, yang menekankan pada tujuan dan sasaran guna upaya perbaikan secara berkesinambungan atas:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah;
2. Meningkatkan daya saing SDM;
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat;

4. Meningkatkan kemudahan akses perekonomian;
5. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan berakhlak mulia;
6. Melestarikan seni budaya melayu berbasis keagamaan.

B. Program Prioritas BPKPAD Pendukung Visi Misi RPJMD 2016-2017.

Untuk mencapai hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal penetapan jangka waktu pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang sebagaimana tertuang didalam RPJMD dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menetapkan Program prioritas sebagai pendukung Visi dan Misi RPJMD 2016-2021 Kabupaten Natuna adalah ***"Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan"*** dengan Indikator Program (Outcome) ***"Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang"***, untuk lebih jelas mengenai program prioritas sebagai pendukung Visi dan Misi RPJMD 2016-2021 Kabupaten Natuna dapat dilihat pada **Tabel. 3.1** di bawah ini;

Tabel 3.1
PROGRAM PRIORITAS Mendukung visi misi RPJMD
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 - 2021
BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Misi, Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
3.02.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang	100%	100%	2,836,853	100%	2,779,482	100%	2,510,000	100%	3,910,000	100%	4,774,000	100%	16,810,335
Jumlah			100%	100%	2,836,853	100%	2,779,482	100%	2,510,000	100%	3,910,000	100%	4,774,000	100%	16,810,335

Sumber : RPJMD Kabupaten Natuna 2016-2021
Lampiran VII

C. Program BPKPAD yang tertuang dalam RPJMD 2016-2017 yang disertai pendanaannya.

Program Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2016-2021 yang tertuang didalam RPJMD terdiri dari 72 Program. Dari 72 Program tersebut yang terkait langsung pelaksanaannya dengan tupoksi BPKPAD terdiri dari 11 Program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah;
8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah;
10. Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah;
11. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Terhadap program Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2016- 2021 yang tidak terkait langsung pelaksanaannya dengan Tupoksi BPKPAD sejumlah 11 Program BPKPAD tetap bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangannya sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban, untuk lebih jelas mengenai program prioritas sebagai pendukung Visi dan Misi RPJMD 2016-2021 Kabupaten Natuna dapat dilihat pada **Tabel. 3.2** di bawah ini;

Tabel 3.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANNYA
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 - 2021
BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	2,230,643	12 Bulan	1,917,200	12 Bulan	2,007,200	12 Bulan	2,067,200	12 Bulan	2,353,200	60 Bulan	10,640,443
1.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60 %	60%	319,000	80%	219,000	70%	219,000	70%	219,000	75%	219,000	75%	1,225,000
1.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	65%	85%	75,000	90%	120,000	90%	120,000	95%	125,000	95%	130,000	95%	955,000
1.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	50%	55%	170,000	60%	170,000	65%	170,000	70%	175,000	75%	170,000	75%	850,000
1.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Profil / Nilai Akuntabilitas	8 / 50,35	80 / 74,00	120,000	88 / 70,80	180,000	88 / 76,00	120,000	88 / 76,00	120,000	88 / 80,00	120,000	88 / 80,00	580,000
1.02.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeluaran Keuangan Daerah	Mempertahankan Fungsi Sarana dan Prasarana ApBast Keuangan Daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	595,360	2 Aplikasi	540,000	2 Aplikasi	640,000	2 Aplikasi	740,000	2 Aplikasi	640,000	2 Aplikasi	3,155,360
		Opini Audit BPK	WTP	WTP	1,435,000	WTP	1,705,113	WTP	690,000	WTP	990,000	WTP	690,000	WTP	5,590,113
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku	100%	100%	1,106,493	100%	1,014,482	100%	1,400,000	100%	2,400,000	100%	3,754,000	100%	9,864,975
1.02.32.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	16	16.0	700,000	17.0	900,000	17.0	600,000	17.0	600,000	18.0	600,000	18.0	3,100,000
		Jumlah Objek Pajak	141	100.0	2,055,280	169.0	1,615,000	170.0	2,649,595	188.0	2,349,595	190.0	2,349,595	198.0	10,079,065
		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	4,40 %	4,65 %	400,000	4,82 %	400,000	4,69 %	400,000	5,05 %	400,000	5,64 %	400,000	5,64 %	2,000,000
1.02.52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Terbisa administrasi keuangan daerah	12 Bulan	12 Bulan	1,230,190	12 Bulan	1,450,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,200,000	12 Bulan	1,350,000	60 Bulan	6,430,190
1.02.53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Persentase operator keuangan yang berkompetensi	85%	80%	850,000	80%	900,000	85%	800,000	90%	800,000	100%	800,000	100%	3,850,000
1.02.56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	WTP	200,100	WTP	309,100	WTP	309,100	WTP	309,100	WTP	309,100	WTP	1,436,500
		Persentase Kinerja Keuangan Daerah	60%	80%	250,000	80%	250,000	82%	250,000	84%	250,000	85%	250,000	86%	1,250,000
1.02.57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Aset Daerah	Persentase Ketersediaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	40%	42%	1,909,000	44%	1,400,000	46%	1,400,000	48%	1,300,000	50%	1,200,000	50%	7,109,000
		Persentase pengembalian barang milik daerah	40%	42%	300,000	44%	100,000	46%	100,000	48%	100,000	50%	150,000	50%	850,000

Sumber : RPJMD Kabupaten Natuna 2016 - 2021
Lampiran VIII

D. Tujuan Sasaran Program Kegiatan Prioritas yang tertuang di dalam Restra BPKPAD tahun 2016-2021.

Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja pada Program dan kegiatan prioritas yang tertuang didalam Restra Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna periode 2012-2021 dapat dilihat pada **Tabel. 3.3** di bawah ini;

Tabel 3.3
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANNYA
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 - 2021
BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya tatakelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi	Predikat / Nilai Akuntabilitas	Predikat / Nilai	8 / 68
2		Optimalisasi potensi sumber-sumber PAD	Persentase PAD Terhadap Penerimaan Daerah	Persen	4,16
			Jumlah Objek Pajak	Objek Pajak	160
			Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	Jenis	16
			Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	Jenis	8
			Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang	Jenis	4
			Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran	Jenis	59
			Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel	Jenis	46
			Persentase Peningkatan PAD	Persen	20
3		Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Hempertahankan fungsi sarana dan prasarana aplikasi keuangan daerah	Aplikasi	4
			Tertib administrasi keuangan daerah	Bulan	12
			Persentase Aparatur Keuangan Yang Berkompetensi	Persen	80
			Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Opini Audit BPK	Opini	WTP
			Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	Persen	42
			Persentase Laporan Keuangan SKPD Yang Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Yang Berlaku	Persen	55,33
			Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakiip)	Nilai	Nilai
			Ketepatan Waktu Dalam Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu



Pemerintah Kabupaten Natuna

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH**

BAB. IV



**Laporan Tahunan
Ta. 2017**

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), pada BAB IV ini akan di bahas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 dan 1 tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut ini;

Dalam tahun anggaran 2017 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menetapkan APBD Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor; 01 tahun 2017, tanggal 27 Januari 2017 dan Peraturan Bupati Nomor; 03 tahun 2017, tanggal 27 Januari 2017 dianggarkan untuk Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 14.960.861.233,-** (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dan untuk Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 19.137.747.500,-** (Sembilan Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), dan dengan adanya kebijakan Pemerintahan Daerah yang bersifat strategis dan adanya kebutuhan yang mendesak maka dilakukan Perubahan APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor; 05 tahun 2017, tanggal 20 Oktober 2017 dan Peraturan Bupati Nomor; 46 tahun 2017, tanggal 20 Oktober 2017, dimana terjadi perubahan anggaran untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar **Rp. 14.308.376.277,-** atau mengalami penurunan anggaran sebesar 4,36 %, dan untuk Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 21.014.133.500,-** atau mengalami kenaikan sebesar 9,80 %.

Pada tahun anggaran 2017 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menetapkan 6 (enam) program dan 26 (dua puluh enam) Kegiatan yang mendukung pencapaian 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran dengan memanfaatkan sumber dana dari APBD Perubahan Kabupaten

Natuna Tahun Anggaran 2017, sebesar **Rp. 21.014.133.500**. Sesuai dengan tabel lampiran RKT Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).

Realisasi anggaran Kegiatan Tahun 2017 yang telah ditetapkan merupakan pencapaian Perencanaan Strategis Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) T.A 2016-2021 secara ringkas keseluruhan rencana program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) untuk Tahun Anggaran 2017 untuk masing-masing urusan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2017 yang dapat dilihat pada **tabel 4.1** dan pengukuran kinerja pada **tabel 4.2** dibawah ini;

Serta untuk menjadi perbandingan pelaksanaan pencapaian Perencanaan Strategis Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), pada tahun 2016 menetapkan 3 (tiga) program yang mendukung pencapaian 3 tujuan dan 3 (tiga) sasaran dengan memanfaatkan sumber dana dari APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan tabel lampiran Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPKAD dapat dilihat pada **tabel 4.4** dan pengukuran kinerja pada **tabel 4.5** dibawah ini;

Tabel 4.1
Penetapan Rencana Kinerja Tahunan
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Tahun 2017

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya tatakelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi	Presikst / Nilai Akuntabilitas	Presikst / Nilai	8 / 100
		Optimalisasi potensi sumber-sumber PAD	Persentase PAD Terhadap Penerimaan Daerah	Persen	4,16
			Jumlah Objek Pajak	Objek Pajak	100
			Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	Jenis	16
			Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	Jenis	8
			Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang	Jenis	4
			Jenis, Rasio dan Jumlah Restoran	Jenis	99
			Jenis, Rasio dan Jumlah Pengkayaan / Hotel	Jenis	46
			Persentase Penghasilan PAD	Persen	20
		Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Memperolehkan Anggar selama dan program APBD keuangan daerah	Apiksal	4
			Tertib administrasi keuangan daerah	Bulan	12
			Persentase Kemitraan Keuangan Yang Berkontribusi	Persen	80
			Belanja waktu dalam penyampaian laporan keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Opini Audit BPK	Opini	WTP
			Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	Persen	42
			Persentase Laporan Keuangan SKPD Yang Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Berlaku	Persen	55,33
			Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Nilai	Nilai
			Kelengkapan Waktu Dalam Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Organisasi Perangkat Daerah Kab. Natuna 2017.

Tabel 4.2
Pengukuran Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Optimalisasi Potensi Sumber-sumber PAD	Persentase PAD Terhadap Penerimaan Daerah	Persen	4.16	25.68	617.31
2.	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	Opini	WTP	82	82
		Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	Persen	42.00	52.99	126.17
		Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang Berlaku	Persen	55.33	62	112.05
Capaian Sasaran					55.67	234.38

Dari **tabel 4.2** dan **tabel 4.3** di atas terlihat bahwa Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk melaksanakan Rencana Kinerja Tahunan yang telah dibuat dan dapat di buktikan dengan tingkat realisasi Kinerja

pada Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) pada tahun 2017 mencapai 44,67 Persen.

Dengan hasil capaian kinerja sebesar 234,38 Persen hal ini dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada tahun 2017 telah berhasil untuk mencapai target kinerja yang telah di rencanakan pada awal tahun 2017.

Sedangkan pada tabel 4.3 dibawah ini, dapat digambarkan bahwa alokasi anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar Rp. 21.014.133.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.741.317.908,47 , atau sebesar 90,82 Persen dengan tingkat efesiensi anggaran sebesar 9,18 Persen atau sebesar Rp. 2.272.819.448,00

Dengan hasil capaian sebesar 90,82 Persen, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada tahun 2017 telah berhasil untuk mencapai target pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan evaluasi hasil pengukuran kinerja kegiatan pada tahun 2017.

Tabel 4.3
Pengukuran Kinerja Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Tahun 2017

No	URAIAN	INPUT	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4,244,127,000.00	3,778,110,419.00	89.03
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Input	Rupiah	45,000,000.00	44,697,000.00	99.33
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Bulan	12	12	100.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input	Rupiah	350,000,000.00	208,379,311.00	59.54
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Bulan	12	12	100.00
01.06.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input	Rupiah	100,000,000.00	99,660,000.00	99.66
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Bulan	12	12	100.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Input	Rupiah	120,000,000.00	118,826,000.00	99.02
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Bulan	12	12	100.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input	Rupiah	175,000,000.00	174,925,000.00	99.96
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Bulan	12	12	100.00

Lanjutan Tabel 4.3 -1

No	URAIAN	INPUT	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4,244,127,000.00	3,778,118,418.00	89.02
01.13.	Persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input	Rupiah	501,350,000.00	337,025,000.00	67.24
		Output	Unit	40	35	87.50
		Outcome	Bulan	12	12	100.00
01.15.	Persediaan bahan besan dan perantara perundang-undangan	Input	Rupiah	35,000,000.00	33,883,400.00	96.84
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Bulan	12	12	100.00
01.17.	Persediaan rekaman dan naskah	Input	Rupiah	146,000,000.00	143,695,000.00	98.37
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Bulan	12	12	100.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Input	Rupiah	838,550,000.00	832,849,347.00	99.19
		Output	Kali	36	45	125.00
		Outcome	Bulan	12	12	100.00
01.19.	Persediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Input	Rupiah	1,493,900,000.00	1,356,732,440.00	90.82
		Output	Orang	37	37	100.00
		Outcome	Bulan	12	12	100.00
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Input	Rupiah	448,427,000.00	448,236,000.00	99.96
		Output	Kali	36	42	116.67
		Outcome	Bulan	12	12	100.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			347,500,000.00	342,336,397.81	98.15
02.16.	Persediaan gedung/gelang kantor	Input	Rupiah	52,500,000.00	52,500,000.00	100.00
		Output	Gedung	1	1	100.00
		Outcome	Persen	65.00	65.00	100.00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input	Rupiah	170,000,000.00	147,613,000.00	86.83
		Output	Gedung	1	1	100.00
		Outcome	Persen	65.00	72.25	112.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input	Rupiah	90,000,000.00	87,239,803.00	96.93
		Output	Unit	8	8	100.00
		Outcome	Persen	65.00	65.00	100.00
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Input	Rupiah	55,000,000.00	54,985,000.00	99.97
		Output	Unit	28	31	110.71
		Outcome	Persen	65.00	92.44	142.22
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75,000,000.00	69,276,000.00	92.37
03.04.	Nasabah dan peningkatan keterampilan aparatur	Input	Rupiah	75,000,000.00	69,276,000.00	92.37
		Output	Orang	5.00	5.00	100.00
		Outcome	Bulan	55.00	69.01	127.11
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			181,300,000.00	175,720,766.00	96.98
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SDG	Input	Rupiah	181,300,000.00	175,720,766.00	96.98
		Output	Laporan	3.00	3.00	100.00
		Outcome	Persen	75.00	68.00	90.67
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			6,363,868,000.00	5,655,657,723.00	88.87
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,588,305,000.00	1,498,891,893.00	94.38
		Output	Perda	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.07.	Penyusunan peraturan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,172,965,000.00	1,071,451,943.00	91.35
		Output	Perda	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	Input	Rupiah	304,350,000.00	175,276,349.00	57.48
		Output	Aplikasi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi administrasi keuangan daerah	Input	Rupiah	326,450,000.00	303,067,377.00	92.84
		Output	Aplikasi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00

Lanjutan Tabel 4.3 -2

No	URAIAN	INPUT	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
17.18.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Input	Rupiah	398,950,000.00	320,851,448.00	80.25
		Output	Laporan	3	3	100.00
		Outcome	Bulan	12	12	100.00
17.22.	Penyusunan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Input	Rupiah	151,560,000.00	145,397,804.00	95.93
		Output	Kal	1	1	100.00
		Outcome	Bulan	12	12	100.00
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	Input	Rupiah	1,872,346,000.00	1,824,835,003.00	97.47
		Output	Raportan	1	1	100.00
		Outcome	Bulan	12	12	100.00
17.56.	Penyusunan pokok-pokok pengelolaan barang daerah	Input	Rupiah	251,840,000.00	78,013,000.00	26.73
		Output	Jurnal	1	1	100.00
		Outcome	Bulan	12	12	100.00
17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Input	Rupiah	255,682,000.00	237,677,438.00	92.96
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Bulan	12	12	100.00
32	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			2,385,433,500.00	2,270,698,118.00	95.19
32.01.	Pendataan objek pajak	Input	Rupiah	225,232,000.00	255,615,906.00	92.00
		Output	Kecamatan	2	2	100.00
		Outcome	Objek Pajak	160	160	100.00
32.03.	Pemagihan wajib pajak	Input	Rupiah	92,300,000.00	91,404,000.00	98.96
		Output	objek pajak	500	320	65.90
		Outcome	Objek Pajak	160	160	100.00
32.04.	Penastabilan data PBB	Input	Rupiah	278,000,000.00	244,877,856.00	88.12
		Output	Kecamatan	2	2	100.00
		Outcome	Objek Pajak	16	16	100.00
32.06.	Rasionalisasi Retribusi	Input	Rupiah	39,286,000.00	39,280,000.00	100.00
		Output	Kecamatan	1	1	100.00
		Outcome	Macam Pajak Retribusi	16	16	100.00
32.09.	Analisa zona nilai tanah	Input	Rupiah	182,500,000.00	147,596,000.00	80.87
		Output	Kecamatan	1	1	100.00
		Outcome	Macam Pajak Retribusi	16	16	100.00
32.11.	Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Perpajakan	Input	Rupiah	58,100,000.00	53,033,000.00	91.28
		Output	aplikasi	1	1	100.00
		Outcome	Objek Pajak	160	160	100.00
32.12.	Integrasi dan Efisiensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Input	Rupiah	719,591,500.00	719,033,444.00	99.92
		Output	Koordinasi	9	9	100.00
		Outcome	Persin	4.66	4.66	100.00
32.13.	Penetapan Objek Pajak PBB-P2 dan SH/HTB	Input	Rupiah	442,280,000.00	434,564,500.00	98.26
		Output	SPPT PBB	1,800	1,380	69.05
		Outcome	Objek Pajak	160	160	100.00
32.14.	Pemagihan Pajak PBB-P2	Input	Rupiah	252,800,000.00	245,201,000.00	97.30
		Output	Objek	43.445	22.960	52.85
		Outcome	Objek Pajak	160	160	100.00
52	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah			2,362,577,000.00	2,299,833,829.00	97.33
52.01.	Penyediaan Pelayanan Penggajian	Input	Rupiah	296,200,000.00	264,008,257.00	89.13
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Bulan	12	12	100.00
52.02.	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SPID	Input	Rupiah	208,500,000.00	209,307,000.00	99.96
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Bulan	12	12	100.00

Lanjutan Tabel 4.3 -3

No	URAIAN	INPUT	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
52.04.	Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Input	Rupiah	878,160,000.00	870,790,505.00	99.14
		Output	Buku	12	12	100.00
		Outcome	Buku	12	12	100.00
52.05.	Penyusunan Profil Keuangan Daerah	Input	Rupiah	148,700,000.00	144,011,800.00	96.85
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Buku	12	12	100.00
52.06.	Rasionalisasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	Input	Rupiah	829,317,000.00	811,516,182.00	97.85
		Output	Sal	4	4	100.00
		Outcome	Buku	12	12	100.00
53	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah			438,170,000.00	374,784,000.00	85.53
53.01.	Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah	Input	Rupiah	438,170,000.00	374,784,000.00	85.53
		Output	Orang	100	142	142.00
		Outcome	Persen	80	80	100.00
56	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah			594,700,000.00	526,909,136.00	88.60
56.01.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan	Input	Rupiah	293,400,000.00	248,180,403.00	84.59
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Opini	100.00	100.00	100.00
56.03.	Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah	Input	Rupiah	301,300,000.00	278,728,633.00	92.51
		Output	S/PD	45	42	93.33
		Outcome	Persen	80.00	80.00	100.00
57	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah			4,601,558,000.00	3,248,289,619.00	81.18
57.01.	Sensus Barang Milik Daerah	Input	Rupiah	1,487,205,000.00	1,435,792,827.00	85.10
		Output	Sal	1	1	100.00
		Outcome	Persen	42.00	42.00	100.00
57.02.	Penyusunan Daftar Ketidakhadiran Barang Milik Daerah	Input	Rupiah	262,464,000.00	238,813,600.00	90.99
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	42.00	42.00	100.00
57.03.	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Input	Rupiah	520,160,000.00	474,412,496.00	91.19
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	42.00	42.00	100.00
57.04.	Pengamanan dan Monitoring Barang Milik Daerah	Input	Rupiah	241,165,000.00	230,792,500.00	95.70
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	42.00	42.00	100.00
57.05.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Nekure	Input	Rupiah	972,044,000.00	381,135,384.00	64.63
		Output	Sal	1	1	100.00
		Outcome	Persen	42.00	42.00	100.00
57.07.	Kajian Tentang Pemanfaatan Potensi BMD	Input	Rupiah	344,090,000.00	275,293,100.00	80.01
		Output	Dokumen	1	1	100.00
		Outcome	Persen	42.00	42.00	100.00
57.08.	Aspirasi Aset / Barang Daerah	Input	Rupiah	374,330,000.00	212,049,650.00	56.65
		Output	Kegiatan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	42.00	42.00	100.00
TOTAL				21,014,133,500.00	18,741,317,905.47	89.22

Sumber: Data Laporan Tahunan BPKAD Ta. 2017.

Tabel 4.4
Penetapan Rencana Kinerja Tahunan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah	Tertib pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12
		Mempertahankan fungsi sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12
		Tertib administrasi keuangan daerah	Bulan	12
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang dan Akuntabel	Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD	Dokumen	2
		Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan	Dokumen	3
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Aplikasi	1
		Aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah	Orang	150
		Opini BPK dalam Laporan Keuangan Daerah	Laporan	WTP
		Laporan penyaluran dana transfer	Persentase	75
		Laporan koordinasi pengelolaan keuangan daerah	Laporan	1
		Laporan daftar kebutuhan barang daerah	Laporan	1
		Pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah	SKPD	45
		Keberadaan inventarisasi aset/ barang milik daerah	Laporan	4
		Mempertahankan fungsi sarana dan prasarana BMD	Bulan	12
		Ajuan SKPD dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	Dokumen	2

Sumber: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Organisasi Perangkat Daerah Kab. Natuna 2016.

Tabel 4.5
Pengukuran Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya fasilitas pendukung kelembagaan untuk pelayanan administrasi publik	Tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	100
		Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	12	100
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Dokumen	8	8	100
			Laporan	5	5	100
		Opini Audit BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualan)	WTP	WTP	WDP	85
		Tersedianya sistem aplikasi keuangan daerah	sistem	3	3	100
		Meningkatkan pemahaman SKPD tentang pengelolaan keuangan daerah	SKPD	42	42	100
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Kegiatan	4	4	100
		Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Laporan	5	5	100
Capaian Sasaran						98.33

Sumber: Data Laporan Tahunan Ta. 2016 BPKAD.

Dari **tabel 4.4** dan **tabel 4.5** di atas terlihat bahwa konsistensi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk melaksanakan Rencana Kinerja Tahunan yang telah dibuat dapat di buktikan dengan tingkat Realisasi pencapaian Penetapan Kinerja pada Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada tahun 2016 mencapai 98,33 Persen, atau 1,67 Persen tingkat capaian kinerja yang tidak dapat direalisasikan.

Dengan hasil capaian kinerja 98,33 Persen ini, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada tahun 2016 telah untuk target kinerja yang telah di rencanakan pada awal tahun 2016, dapat terlaksana.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 dan Peraturan Bupati No 12 Tahun 2016 BPKAD melaksanakan 3 program dan 37 kegiatan. Dalam mendukung misi ke-5 Kepala Daerah meningkatkan profesionalisme Pemerintah dengan tujuan Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan memiliki kinerja prima dengan 2 sasaran yaitu dengan meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel maka BPKAD pada tahun 2016 melaksanakan program rutinitas yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi Rp. 15.048.088.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.939.530.400- dengan persentase penyerapan dana sebesar 92,63 Persen, dan dengan tingkat evesiensi penggunaan anggaran sebesar 7,37 Persen atau sebesar Rp. 1.108.557.600-, untuk dapat lebih jelas Pengukuran Kinerja Kegiatan pada tahun 2016 akan disajikan pada **tabel 4.6** dibawah ini;

Tabel 4.6
Pengukuran Kinerja Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2016

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PENGUKURAN KINERJA			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	2,470,564,000	2,338,218,732	94.64
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	45,000,000	44,949,000	99.89
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	Tahun	1	1	100
		Rp	267,200,000	160,619,740	60.11
	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tahun	1	1	100
		Rp	99,000,000	99,000,000	100.00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tahun	1	1	100
		Rp	95,000,000	94,890,000	99.88
	5. Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Tahun	1	1	100
		Rp	152,000,000	152,000,000	100.00
		Tahun	1	1	100
	6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp	430,040,000	416,147,100	96.77
		Paket	1	1	100
	7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	5,000,000	3,630,000	72.60
		tahun	1	1	100
	8. Penyediaan makanan dan minuman	Rp	18,000,000	18,000,000	100.00
		tahun	1	1	100
	9. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah	Rp	758,950,000	756,409,990	99.67
		tahun	42	42	100
	10. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Rp	466,800,000	459,550,000	98.45
		orang	20	20	100
	11. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah	Rp	133,574,000	133,022,900	99.59
		OK	48	48	100
		tahun	1	1	100
		Rp	284,000,000	226,583,400	79.82
2.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	12. Penyediaan gedung/gudang kantor	Rp	139,000,000	86,500,000	62.23
		tahun	1	1	100
		tahun	1	1	100

NO	PROGRAM/KESEKUTAN	PENGABUKAN KEMERIA			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	4	5	6	7
3.	13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp	70,000,000	65,842,400	94.06
		tahun	1	1	100
		tahun	1	1	100
	14. Pemeliharaan rutin/berkala persitan dan perlengkapan kantor	Rp	75,000,000	74,341,000	99.12
		tahun	1	1	100
		tahun	1	1	100
	15. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Rp	12,293,524,000	11,374,628,268	92.53
		Rp	1,296,366,000	1,168,213,776	90.11
		dok	2	-	-
		dok	2	-	-
	16. Penyusunan penitahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Rp	1,141,526,000	1,131,474,150	97.41
		dok	2	2	100
		dok	2	2	100
	17. Penyusunan laporan pertanggungjawab pelaksanaan APBD	Rp	777,820,000	693,865,828	89.21
		Dok	4	4	100.00
		dok	4	4	100
	18. Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi perantaraan keuangan daerah	Rp	372,260,000	316,289,200	84.96
		Paket	4	4	100.00
		%	100	100	100
	19. Penyusunan laporan keuangan semester I dan laporan realisasi anggaran triwulan	Rp	342,200,000	326,972,550	95.55
		Laporan	2	2	100.00
		Laporan	2	2	100
	20. Bimbingan teknis tata usaha keuangan daerah	Rp	351,900,000	312,494,117	88.80
		Paket	1	1	100.00
		orang	150	150	100
	21. Rekonsiliasi dan sinkronisasi data keuangan		658,150,000	642,732,069	97.66
		%	85	85	100
		%	85	85	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	4	5	6	7
22.	Penyelenggaraan pelayanan pengkajian	Rp	408,720,000	419,544,802	89.51
		paket	6	6	100
		%	85	85	100
23.	Validasi data laporan keuangan daerah	Rp	891,811,000	875,327,884	98.15
		%	100	100	100
		%	100	100	100
24.	Koordinasi pengelolaan keuangan daerah	Rp	1,016,788,000	1,006,872,520	99.02
		%	80	80	100.00
		%	80	80	100.00
25.	Peningkatan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah SIPD	Rp	907,940,000	872,262,600	96.07
		%	70	70	100.00
		%	70	70	100.00
26.	Penyusunan surat penyetoran dana (SPD) dan anggaran kas	Rp	123,800,000	121,755,000	98.35
		%	85	85	100.00
		%	85	85	100.00
27.	Penyelenggaraan pelayanan SP2D	Rp	309,000,000	292,661,000	94.71
		paket	1	1	100.00
		paket	1	1	100.00
28.	Penyusunan daftar kebutuhan barang	Rp	230,918,000	194,585,500	84.27
		%	90	90	100.00
		duk	1	1	100.00
29.	Peningkatan laporan dan kinerja keuangan daerah	Rp	448,368,000	333,701,934	74.43
		%	90	90	100.00
		%	90	90	100.00
30.	Pengamanan aset/barang milik daerah	Rp	458,520,000	413,876,400	90.26
		%	90	90	100.00
		Duk	1	1	100.00
31.	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	Rp	461,029,000	395,930,700	85.88
		%	90	90	100.00
		%	90	90	100.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PENGUKURAN KINERJA			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	4	5	6	7
32.	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah	Rp	489,190,000	458,832,940	93.79
		%	90	90	100.00
		%	90	90	100.00
33.	Verifikasi dan rekonsiliasi data aset SKPD kab. Natuna	Rp	310,248,000	304,798,700	89.58
		%	90	90	100.00
		Lap	1	1	100.00
34.	Rekonsiliasi data pajak	Rp	382,710,000	367,325,698	95.98
		%	90	90	100.00
		%	90	90	100.00
35.	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi INFIS BMD	Rp	199,450,000	178,075,550	89.28
		Aplikasi	1	1	100.00
		Aplikasi	1	1	100.00
36.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Rp	230,330,000	185,745,550	80.64
		Dokumen	2	2	100.00
		Dokumen	2	2	100.00
37.	Identifikasi barang milik daerah	Rp	374,470,000	361,259,800	96.47
		%	90	90	100.00
		%	90	90	100.00
TOTAL			15,049,088,800	13,929,536,400	92.63

Sumber: Data Laporan Tahunan BPKAD Ta. 2016.

Sebagai bahan/data pendukung atas Laporan Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Natuna Tahun 2017 dengan membandingkan realisasi pelaksanaan pada tahun sebelumnya (2016), sebagai mana yang telah tertuang di dalam Rencana strategis (RESTR) BPKPD tahun 2016-2021, yang telah di jelaskan diatas yang berisikan capaian kinerja output/output program Kegiatan, serta sebagai saran/rekomendasi atas usulan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2018/2019 yang diantaranya ;

1. Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah tahun 2017, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna.
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun anggaran 2017, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna.
3. Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD Kabupaten Natuna Tahun 2017, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna.
4. Rekomendasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2018/2019, dari Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2017.
5. Program Prioritas Pendukung Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2016-2021, Pembangunan Daerah tahun 2017, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna.
6. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaannya Kabupaten Natuna Tahun 2017-2021, Pembangunan Daerah tahun 2017, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna.

Untuk data-data pendukung yang di sebutkan diatas akan disajikan di dalam **Lampiran**.

B. Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2018

Pada tahun anggaran 2018 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menetapkan 9 (sembilan) program dan 45 (empat puluh lima) Kegiatan yang mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran dengan memanfaatkan sumber dana dari APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), yang disajikan dalam **Lampiran**.

Serta untuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada **tabel 4.7** dibawah ini;

Tabel 4.7
Program/Kegiatan dan Target Kinerja
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Tahun 2018

Uraian	Uraian Kegiatan	Satuan	Sumber Dana	Jumlah
1	2	3	4	5
3.02. KEUANGAN				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,430,654,760.00
1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	APBD	40,000,000.00
1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	APBD	152,000,000.00
1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	APBD	100,000,000.00
1 10	Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	APBD	120,000,000.00
1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	APBD	175,000,000.00
1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 Unit	APBD	199,250,000.00
1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	APBD	35,000,000.00
1 17	Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	APBD	125,000,000.00
1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	36 kali	APBD	529,500,000.00
1 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	37 Orang	APBD	733,130,760.00
1 20	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	36 Kali	APBD	221,774,000.00
Jumlah Program				2,430,654,760.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			325,100,000.00
2 16	Penyediaan gedung/gudang kantor	1 Gedung	APBD	52,500,000.00
2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Gedung	APBD	70,000,000.00
2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8 unit	APBD	120,000,000.00
2 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30 Unit	APBD	82,600,000.00
Jumlah Program				325,100,000.00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75,000,000.00
5 4	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	5 Orang	APBD	75,000,000.00
Jumlah Program				75,000,000.00
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			137,250,000.00
6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	APBD	137,250,000.00

Uraian	Uraian Kegiatan	Satuan	Sumber Dana	Jumlah
1	2	3	4	5
3.02. KEUANGAN				
Jumlah Program				137,250,000.00
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			4,777,345,000.00
17 6	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	1 Perda	APBD	1,077,075,000.00
17 7	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	1 Perda	APBD	1,005,315,000.00
17 10	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	1 Aplikasi	APBD	254,985,000.00
17 11	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	1 Aplikasi	APBD	296,110,000.00
17 18	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	3 Laporan	APBD	480,250,000.00
17 27	Validasi data laporan keuangan daerah	1 kegiatan	APBD	1,389,970,000.00
17 56	Penyusunan pokok-pokok pengelolaan barang daerah	1 Juknis	APBD	83,120,000.00
17 75	Rekonsiliasi data pajak	12 Bulan	APBD	190,520,000.00
Jumlah Program				4,777,345,000.00
32	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			1,394,918,100.00
32 2	Pendataan objek pajak	2 kecamatan	APBD	87,344,000.00
32 3	Penagihan wajib pajak	500 objek pajak	APBD	72,882,000.00
32 4	Pemutakhiran data PBB	3 Kecamatan	APBD	47,383,000.00
32 6	Rekonsiliasi retribusi	3 kali	APBD	47,860,000.00
32 9	Analisa zona nilai tanah	7 Kecamatan	APBD	175,980,000.00
32 12	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	9 koordinasi	APBD	299,823,000.00
32 13	Penetapan Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB	2000 SPPT PBB	APBD	552,730,300.00
32 14	Penagihan Pajak PBB-P2	45.618 Objek	APBD	110,915,800.00
Jumlah Program				1,394,918,100.00
52	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah			2,377,975,000.00
52 1	Penyelenggaraan pelayanan penggalan	12 Bulan	APBD	255,550,000.00
52 2	Penyusunan surat penyediaan dana (SPD), anggaran kas dan SP2D	12 Bulan	APBD	100,000,000.00
52 3	Rekonsiliasi dan sinkronisasi data keuangan	4 Kali	APBD	767,985,000.00
52 4	Peningkatan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	12 Bulan	APBD	1,254,440,000.00
Jumlah Program				2,377,975,000.00
56	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah			857,206,000.00
56 2	Penyusunan laporan keuangan semester I dan laporan realisasi anggaran triwulan	1 laporan	APBD	364,100,000.00
56 3	Peningkatan laporan dan kinerja keuangan daerah	45 SKPD	APBD	493,106,000.00
Jumlah Program				857,206,000.00

Lanjutan Tabel 4.7 -2

Uraian	Uraian Kegiatan	Satuan	Sumber Dana	Jumlah
1	2	3	4	5
3.02. KEUANGAN				
57	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah			975,150,000.00
57 2	Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah	1 laporan	APBD	100,060,000.00
57 3	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	1 Laporan	APBD	144,642,000.00
57 4	Pengamanan dan monitoring barang milik daerah	1 Laporan	APBD	98,002,000.00
57 5	Verifikasi dan rekonsiliasi data aset	1 Kali	APBD	150,646,000.00
57 8	Appraisal aset/barang daerah	1 Kegiatan	APBD	362,390,000.00
57 9	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah	1 laporan	APBD	119,410,000.00
Jumlah Program				975,150,000.00
Jumlah Program				13,350,598,860.00

Sumber: Data DPA BPKPAD Ta. 2018.

Dalam mendukung misi ke-5 Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Natuna pada tabel 4.7 diatas, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) pada tahun 2018 melaksanakan 9 (sembilan) program dengan 46 (empat puluh enam) Kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 13.350.598.860,- (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah), atau sekitar 63,53 Persen dari alokasi anggaran belanja langsung pada tahun 2017, dengan tingkat efesiensi anggaran tahun 2018 sebesar 36,47 Persen.

C. Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran/Program BPKPAD yang Tertuang dalam RPJMD 2016-2021

Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran/Program Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) pendukung Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 yang tertuang di dalam Rencana Strategis (RESTR) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) pada tahun 2017, akan di sajikan pada **Tabel 4.8** di bawah ini;

Tabel 4.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran/Program BPKPAD dalam RPJMD
Pendukung Visi dan Misi Kabupaten Natuna
Tahun 2017

Kode	Misi, Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Tahun 1 (2017)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
3.02.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang Berlaku	100%	100%	93,33 %	112,05%
JUNLAH			100%	100%	93,33 %	112,05%

Sumber: Data LAKIP BPKPAD Ta. 2017.

Dari tabel 4.8 diatas terlihat bahwa persentase realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 93,33 % atau menurun dari kondisi kinerja awal RPJMD tahun 2016 sebesar 6,67 % dari target sebesar 100 %, sedangkan untuk target capai kinerja pada tahun 2017 sebesar 55,33 % dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 112,05 %.

Sedangkan perbandingan pada tahun 2016 untuk target capai sebesar 44,26 % dengan realisasi Kinerja sebesar 83,00 % dengan tingkat capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 187,53 %, dimana target capaian kinerja di akumulasikan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) periode 2016-2021.

Berdasarkan analisa diatas perbandingan relisasi kinerja dari tahun 2016-2017, terdapat penurunan terhadap capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 75,74 % dari capaian kinerja tahun 2016.

Mengingat untuk target capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 55,33 % dan realisasi Capaian Kinerja sebesar 62.00 % sehingga dapat dikategorikan bahwa capaian kinerja Badan Pengelola

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) pada tahun 2017 **Tercapai/ Berhasil** dilaksanakan sesuai dengan target dengan peningkatan Capaian kinerja sebesar 6,67 %.

Untuk gambaran lebih lanjut tentang capaian Indikator Kinerja Pembangunan dalam RPJMD tahun 2016-2021, terhadap capaian kinerja tahun 2016 dan 2017, akan disajikan di dalam *Lampiran*.

D. Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) tidak terlepas dengan adanya kerjasama dari pihak lain (ketiga) yang meliputi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, yang berupa MoU (*Memorandum of Understanding*) atau Perjanjian kerjasama, yang diantaranya :

1. Kerjasama dengan Bank Riau Kepri Cabang Ranai.

Atas Nama Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), melakukan Perikatan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai Tentang: **"Pengelolaan Dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna"** Nomor: 09/Mou/BPKAD/IX/2014 dan Nomor :1014/HK05/RNI/2014, ditetapkan di Ranai pada tanggal, 16 September 2014.

2. Kerjasama dengan Bank Mandiri Kantor Cabang Natuna.

2.1 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), melakukan Perikatan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan PT. Mandiri (Persero) KCP. Natuna Tentang: **"Pengelolaan Dana Kas Pemerintah Kabupaten Natuna"** Nomor: 08/Mou/BPKAD/IX/2014 dan Nomor :1.SP.NTN/470/2014, ditetapkan di Ranai pada tanggal, 16 September 2014.

2.2 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), melakukan Perikatan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan PT. Mandiri (Persero) KCP. Natuna Tentang: **"Pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Melalui Rekening Lainnya Rekening Penampung Penyetoran (PFK) Pada Bank Pemegang Kas Daerah Selaku Bank Persepsi"** Nomor: 11/Mou/BPKAD/XII/2016 dan Nomor :1.SP.NTN/737/2016, ditetapkan di Ranai pada tanggal, 21 Desember 2016.

3. Kerjasama dengan BPJS dalam Pelayanan Kesehatan PNS.

Atas Nama Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), melakukan Perikatan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenaga Kerjaan Kantor Cabang Tanjungpinang Tentang: **"Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Bagi Pegawai PTT, GTT dan PTT Paramedis Pemerintah Kabupaten Natuna"** Nomor: 180/HK-PK/36/2017 dan Nomor :PKS/002/112017, ditetapkan di Ranai pada tanggal, 17 November 2017.



Pemerintah Kabupaten Natuna

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH**

BAB. V



**Laporan Tahunan
Ta. 2017**

BAB V HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN KUTINITAS BPKPAD

Realisasi dan capaian kinerja yang dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun 2017, sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing bidang di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah secara ringkas akan dijelaskan sebagai berikut ini;

1. Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat BPKPAD memiliki tugas menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang dalam hal ini melaksanakan 4 (empat) Program dan 17 (tujuh belas) Kegiatan, seperti pada **Table 5.1** di bawah ini;

Tabel 5.1
Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Tahun 2017

No	URAIAN	INPUT	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4,244,127,000.00	3,778,110,000.00	89.17
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Input	Rupiah	45,000,000.00	44,697,000.00	99.33
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input	Rupiah	350,000,000.00	208,379,311.00	59.54
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input	Rupiah	100,000,000.00	99,460,000.00	99.46
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Input	Rupiah	120,000,000.00	118,828,400.00	99.02
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input	Rupiah	175,000,000.00	174,925,000.00	99.96
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input	Rupiah	501,250,000.00	337,825,000.00	67.24
		Output	Unit	40	35	87.50
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan prosedur penulisan undangan	Input	Rupiah	35,000,000.00	23,883,400.00	68.24
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00

Lanjutan Tabel 5.1

No	URAIAN	INPUT	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4,244,137,000.00	3,778,116,898.00	89.17
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Input	Rupiah	146,000,000.00	143,895,000.00	97.87
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi tingkat daerah	Input	Rupiah	829,550,000.00	822,849,347.00	99.19
		Output	Kali	36	45	125.00
		Outcome	Persen	100.00	125.00	125.00
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Input	Rupiah	1,493,960,000.00	1,356,732,640.00	90.82
		Output	Orang	37	37	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Input	Rupiah	448,427,000.00	448,236,800.00	99.96
		Output	Kali	36	42	116.67
		Outcome	Persen	100.00	116.67	116.67
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			367,500,000.00	347,336,083.00	94.53
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Input	Rupiah	52,500,000.00	52,500,000.00	100.00
		Output	Gedung	1	1	100.00
		Outcome	Persen	65.00	65.96	101.51
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input	Rupiah	170,000,000.00	147,612,000.00	86.83
		Output	Gedung	1	1	100.00
		Outcome	Persen	65.00	72.85	112.08
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input	Rupiah	90,000,000.00	87,239,083.00	96.93
		Output	Unit	8	8	100.00
		Outcome	Persen	65.00	65.96	101.51
02.25.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Input	Rupiah	55,000,000.00	54,985,000.00	99.97
		Output	Unit	20	31	155.00
		Outcome	Persen	65.00	92.44	142.22
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75,000,000.00	69,276,900.00	92.37
03.04.	Kursus dan peningkatan keterampilan aparat	Input	Rupiah	75,000,000.00	69,276,900.00	92.37
		Output	Orang	15.00	18.00	120.00
		Outcome	Persen	55.00	68.91	125.29
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			181,200,000.00	175,720,766.00	96.98
04.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SPKD	Input	Rupiah	181,200,000.00	175,720,766.00	96.98
		Output	Laporan	3.00	3.00	100.00
		Outcome	Persen	75.00	100.00	133.33
Realisasi Capaian Kinerja				87.71	94.64	107.77
Realisasi Anggaran Kegiatan				4,867,827,000.00	4,365,443,847.00	89.69

Berdasarkan dengan **Tabel 5.1** diatas, di jelaskan bahwa Sekretariat mengelola kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4,867,827,000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4,365,443,847- atau 93,61 Persen dengan persentase efisiensi anggaran sebesar 6,39 Persen, dengan tingkat capaian kinerja pada bagian sekretariat BPKPAD sebesar 109,27 % dengan rencana target realisasi pada tahun 2017 sebesar 87,71 Persen dan realisasi pelaksanaan sebesar 94,64 Persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk tahun 2017 pada bagian Sekretariat **berhasil** terlaksana dengan tingkat realisasi meningkatn sebesar 6,93 Persen dari target tahun 2017.

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran BPKPAD memiliki tugas Merumusan prosedur penyusunan rancangan Perubahan APBD, pengendalian penyusunan anggaran, dan mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan teknis penyusunan anggaran dan belanja, pelaporan BLUD, JKN, Penyertaan Modal, Dana Bergulir, investasi jangka pendek, tunjangan profesi guru PNSD, Tambahan Penghasilan guru PNSD dan Piutang yang dalam hal ini melaksanakan 1 (satu) Program dan 3 (tiga) Kegiatan, seperti pada **Table 5.2** di bawah ini;

Tabel 5.2
Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bidang Anggaran
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Tahun 2017

No	URAIAN	INPUT	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			4,633,436,000.00	4,395,278,849.00	94.86
17.06	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,588,205,000.00	1,498,891,963.00	94.38
		Output	Porsi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.07	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Input	Rupiah	1,172,965,000.00	1,071,451,943.00	91.38
		Output	Porsi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.27	Validasi data laporan keuangan daerah	Input	Rupiah	1,872,266,000.00	1,824,935,943.00	97.47
		Output	Kegiatan	1	1	100.00
		Outcome	Bulan	100.00	100.00	100.00
Realisasi Capaian Kinerja				100.00	100.00	100.00
Realisasi Anggaran Kegiatan				4,633,436,000.00	4,395,278,849.00	94.86

Dilihat dari **Tabel 5.2** diatas, dapat disimpulkan bahwa Bidang Anggaran mengelola kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4,633,436,000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4,395,278,849- atau 94,86 Persen dengan persentase efisiensi anggaran sebesar 5,14 Persen, dengan tingkat capaian kinerja pada bidang anggaran BPKPAD sebesar 100 % maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk tahun 2017 pada bidang anggaran **berhasil** terlaksana dengan tingkat realisasi pelaksanaan sebesar 100 Persen.

3. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan BPKPAD memiliki tugas merencanakan kebijakan umum tentang penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, yang dalam hal ini melaksanakan 1 (satu) Program dan 8 (delapan) Kegiatan, seperti pada **Table 5.3** di bawah ini;

Tabel 5.3
Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendapatan
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Tahun 2017

No	URAIAN	INPUT	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
33	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			2,346,153,500.00	2,231,415,700.00	95.11
33.02.	Pendapatan objek pajak	Input	Rupiah	321,822,000.00	295,615,906.00	92.00
		Output	kecamatan	2	2	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
33.03.	Pemungutan wajib pajak	Input	Rupiah	92,360,000.00	91,404,000.00	98.96
		Output	objek pajak	500	325	65.00
		Outcome	Persen	100.00	65.00	65.00
33.04.	Penyusutan data PDB	Input	Rupiah	278,000,000.00	244,877,850.00	88.12
		Output	kecamatan	2	2	100.00
		Outcome	Persen	99.00	100.00	100.00
33.05.	Analisa zona nilai tanah	Input	Rupiah	182,500,000.00	147,598,000.00	80.87
		Output	kecamatan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
33.11.	Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Pemungutan	Input	Rupiah	58,100,000.00	53,033,000.00	91.28
		Output	aplikasi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
33.12.	Integrasi dan Efisiensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Input	Rupiah	715,591,500.00	719,023,444.00	99.92
		Output	koordinasi	9	9	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
33.13.	Penetapan Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB	Input	Rupiah	442,280,000.00	434,564,500.00	98.26
		Output	SPPT PBB	2,000	1,381	69.05
		Outcome	Persen	100.00	69.05	69.05
33.14.	Pemungutan Pajak PBB-P2	Input	Rupiah	252,000,000.00	245,201,800.00	97.30
		Output	Objek	43,445	32,960	75.85
		Outcome	Persen	100.00	75.85	75.85
Realisasi Capaian Kinerja				100.00	85.96	85.96
Realisasi Anggaran Kegiatan				2,346,153,500.00	2,231,415,700.00	95.11

Dilihat dari **Tabel 5.3** diatas, dapat disimpulkan bahwa Bidang Pendapatan mengelola kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,346,153,500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2,231,415,700- atau sebesar 95,11 Persen dengan persentase efisiensi anggaran sebesar 4,89 Persen, dengan tingkat capaian kinerja pada bidang anggaran BPKPAD sebesar 85,96 % maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk tahun 2017 pada bidang Pendapatan **berhasil** terlaksana dengan tingkat realisasi pelaksanaan sebesar 85,96 Persen.

4. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi Keuangan Daerah BPKPAD memiliki tugas melakukan Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan, penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang dalam hal ini melaksanakan 4 (empat) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan, seperti pada **Table 5.4** di bawah ini;

Tabel 5.4
Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bidang Akuntansi Keuangan Daerah
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Tahun 2017

No	URAIAN	INPUT	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
47	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			1,438,592,000.00	1,182,365,416.00	82.19
17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	Input	Rupiah	304,950,000.00	175,376,348.00	57.48
		Output	Aplikasi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	Input	Rupiah	326,450,000.00	303,067,377.00	92.84
		Output	Aplikasi	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.14.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Input	Rupiah	359,950,000.00	329,951,448.00	91.93
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.22.	Penyusunan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Input	Rupiah	151,560,000.00	145,392,804.00	95.93
		Output	Kali	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Input	Rupiah	255,682,000.00	237,677,438.00	92.96
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
53	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah			2,362,577,000.00	2,299,533,744.00	97.33
52.01.	Peningkatkan pelayanan penggalan	Input	Rupiah	256,900,000.00	264,008,257.00	102.77
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
52.02.	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan APBD	Input	Rupiah	309,500,000.00	289,307,000.00	93.48
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
52.04.	Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Input	Rupiah	878,160,000.00	878,790,505.00	100.06
		Output	Bulan	12	12	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
52.05.	Penyusunan Profil Keuangan Daerah	Input	Rupiah	148,700,000.00	144,011,800.00	96.85
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
52.06.	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	Input	Rupiah	829,317,000.00	811,516,182.00	97.85
		Output	Kali	4	4	100.00
		Outcome	Persen	100.00	100.00	100.00
53	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah			438,170,000.00	374,784,900.00	85.53
53.02.	Singkatan teknis pengelolaan keuangan daerah	Input	Rupiah	438,170,000.00	374,784,900.00	85.53
		Output	Orang	130	142	142.00
		Outcome	Persen	100.00	142.00	142.00
56	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah			594,700,000.00	536,909,035.00	90.28
56.03.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan	Input	Rupiah	293,400,000.00	348,180,403.00	118.67
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Dari	100.00	100.00	100.00
56.03.	Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah	Input	Rupiah	301,300,000.00	278,728,632.00	92.51
		Output	SPD	45	42	93.33
		Outcome	Persen	100.00	93.33	93.33
	Realisasi Capaian Kinerja			100.00	103.77	103.77
	Realisasi Anggaran Kegiatan			4,834,036,000.00	4,213,312,395.00	87.18

Dilihat dari **Tabel 5.4** diatas, dapat disimpulkan bahwa Bidang Akuntansi Keuangan Daerah mengelola kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4,834,039,000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4,383,539,095- atau sebesar 90,68 Persen dengan persentase efesiensi anggaran sebesar 9,32 Persen, dengan tingkat capaian kinerja pada bidang Akuntansi Keuangan Daerah BPKPAD sebesar 102,72 % maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk tahun 2017 pada bidang Pendapatan **berhasil** terlaksana.

5. Bidang Aset

Bidang Aset BPKPAD memiliki tugas melakukan Penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah yang dalam hal ini melaksanakan 2 (dua) Program dan 7 (tujuh) Kegiatan, seperti pada **Table 5.5** di bawah ini;

Tabel 5.5
Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bidang Akuntansi Keuangan Daerah
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Tahun 2017

No	URAIAN	INPUT	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			291,840,000.00	79,013,000.00	26.73
17.56	Penyusunan pelak-pelak pengelolaan barang daerah	Input	Rupiah	291,840,000.00	79,013,000.00	26.73
		Output	Juile	1	1	100.00
		Outcome	Bulan	12	12	100.00
57	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah			3,739,094,000.00	3,069,475,961.00	80.48
57.01	Sensus Barang Milik Daerah	Input	Rupiah	1,687,205,000.00	1,435,792,837.00	85.18
		Output	Kel	1	1	100.00
		Outcome	Persen	42.30	42.00	100.00
57.03	Penghapusan dan Penindakan Barang Milik Daerah	Input	Rupiah	520,280,000.00	474,412,490.00	91.19
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	42.00	42.00	100.00
57.04	Pengamanan dan Monitoring Barang Milik Daerah	Input	Rupiah	241,165,000.00	230,792,500.00	95.78
		Output	Laporan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	42.00	42.00	100.00
57.05	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Matara	Input	Rupiah	572,044,000.00	391,136,384.00	66.63
		Output	Kel	1	1	100.00
		Outcome	Persen	42.00	42.00	100.00
57.07	Kajian Tentang Pemanfaatan Potensi BMD	Input	Rupiah	344,060,000.00	275,292,100.00	80.01
		Output	Dokumen	1	1	100.00
		Outcome	Persen	42.00	42.00	100.00

Lanjutan Tabel 5.5

No	URAIAN	INPUT	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
57	Program Perencanaan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah			3,739,094,000.00	3,009,478,941.00	80.49
57.00	Appraisal Aset / Barang Daerah	Input	Rupiah	374,330,000.00	312,049,650.00	83.65
		Output	Kegiatan	1	1	100.00
		Outcome	Persen	100.00	42.00	42.00
		Realisasi Capaian Kinerja		100.00	100.00	100.00
		Realisasi Anggaran Kegiatan		4,030,334,000.00	3,087,468,941.00	76.59

Dilihat dari **Tabel 5.4** diatas, dapat disimpulkan bahwa Bidang Akuntansi Keuangan Daerah mengelola kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4,834,039,000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4,383,539,095- atau sebesar 90,68 Persen dengan persentase efesiensi anggaran sebesar 9,32 Persen, dengan tingkat capaian kinerja pada bidang Akuntansi Keuangan Daerah BPKPAD sebesar 102,72 % maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk tahun 2017 pada bidang Pendapatan **berhasil** terlaksana.



Pemerintah Kabupaten Natuna

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH**

BAB. VI



**Laporan Tahunan
Ta. 2017**

BAB VI **PENUTUP**

Kesimpulan

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terbentuk berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah, dan Perbup Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna merupakan pendukung atas keberhasilan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2016-2021, Terhadap misi yang diemban oleh **Kepala daerah Kabupaten Natuna 2016-2021 BPKPAD menjadi pelaksana dan penunjang dari segi pengelolaan keuangan dimana BPKPAD akan memberikan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, SKPD dan masyarakat luas yang terkait dengan pelaksanaan misi tersebut, dari segi pengelolaan keuangan.**

Untuk mencapai hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal penetapan jangka waktu pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang sebagaimana tertuang didalam RPJMD dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menetapkan Program prioritas sebagai pendukung Visi dan Misi RPJMD 2016-2021 Kabupaten Natuna adalah ***"Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan"*** dengan Indikator Program (*Outcome*) ***"Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku"***, untuk lebih jelas mengenai program prioritas sebagai pendukung Visi dan Misi RPJMD 2016-2021 Kabupaten Natuna.

Untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menetapkan rencana kinerja yang menjadi komitmen Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan pembangunan tahun 2017 dari rencana tersebut dapat

diidentifikasi upaya Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk mewujudkan visi, dan misi yang telah ditetapkan yaitu meliputi 3 (tiga) sasaran strategis yang tercermin dari 4 indikator sasaran yang dilaksanakan dalam 6 (enam) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan dengan memanfaatkan sumber dana dari APBD Perubahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp. 21.014.133.500.

Indikator Kinerja Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2017 tersebut merupakan parameter untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan komitmen instansi pemerintah (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) Kabupaten Natuna.

Secara umum 2 (dua) Sasaran strategis yang tercakup dalam 5 program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 dapat dicapai sepenuhnya atau lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan hal ini menunjukkan adanya komitmen penuh dari Pimpinan (kepala) beserta dukungan pegawai/staf dilingkungan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2017.

Pada tahun 2017 Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah telah mengalokasikan Belanja Langsung sebesar Rp. 19.137.747.500,- untuk mencapai 3 sasaran strategis, 10 program dan 50 kegiatan, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 21.014.133.500,- tersebut hingga berakhirnya tahun anggaran 2017 telah terealisasi sebesar Rp. 18.741.314.052,- atau 89,18 %, dengan tingkat efisiensi anggaran pada tahun anggaran 2017 sebesar 10,82 %, sedangkan untuk tahun 2018 Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 9 (sembilan) program dengan 46 (empat puluh enam) Kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 13.350.598.860,- (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah), atau sekitar 63,53 Persen dari alokasi anggaran belanja langsung pada tahun 2017, dengan tingkat efisiensi anggaran tahun 2018 sebesar 36,47 Persen.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) tidak terlepas dengan adanya kerjasama dari pihak lain (ketiga) yang meliputi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, yang berupa MoU (*Memorandum of Understanding*) atau Perjanjian kerjasama, yang diantaranya :

1. Kerjasama dengan Bank Riau Kepri Cabang Ranai.
2. Kerjasama dengan Bank Mandiri Kantor Cabang Natuna.
3. Kerjasama dengan BPJS dalam Pelayanan Kesehatan PNS.

Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil evaluasi diatas, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merekomendasikan program kegiatan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk di tindak lanjuti dan dilanjutkan pada Rencana Kerja Tahunan tahun 2018/2019 yang diantaranya ;

1. Rekomendasi untuk melanjutkan Program Kegiatan yang terkait dengan peningkatan capaian kinerja dan target Capaian pada Tahun 2018/2019, terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Rekomendasi untuk melanjutkan Program Kegiatan yang terkait dengan peningkatan capaian kinerja dan target Capaian pada Tahun 2018/2019, terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur ASN SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap Pemahaman laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
3. Rekomendasi untuk melanjutkan Program Kegiatan yang terkait dengan peningkatan capaian kinerja dan target Capaian pada Tahun 2018/2019, terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur ASN SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Merekomendasi untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, guna peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, sesuai dengan

ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ranai, 10 Januari 2018



Kepala,

R. DICKY KUSNIADI, SE
19660503 198703 1 001